BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata Bencana adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Bencana juga bisa diartikan sebagai suatu kejadian yang secara alami maupun karena ulah manusia, yang terjadi secara mendadak yang menimbulkan kerugian, sehingga masyarakat dipaksa untuk melakukan penanggulangan. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Peristiwa alam dapat berupa hujan, angin, gerakan tanah, banjir, gelombang laut, dan gempa bumi. Peristiwa alam terjadi karena keteraturan alam, peristiwa alam tidak dapat direncanakan, atau direkayasa oleh manusia. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam. Sepanjang masa alam dan lingkungannya telah menyediakan sumber daya demi kesejahteraan hidup manusia. Namun alam tidak selalu berpihak pada manusia, alam juga bisa saja menjadi ancaman bagi manusia, jika manusia tidak menjaganya dengan baik. Terkadang alam juga bisa menyebabkan kehancuran dan memakan korban jiwa akibat bencana alam.

Karakteristik geologis dan geografis menempatkan Indonesia sebagai salah satu kawasan rawan bencana seperti dibuktikan oleh berbagai bencana yang menimpa Indonesia cotohnya gemba dan tsunami di Aceh tahun 2004, letusan gunung Kelud di Jawa Timur tahun 2014 dan gempa dan tsunamidi Palu dan Donggala tahun2018. Secara geografis indonesia merupakan negara kepulauan

yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa-Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Wilayah Indonesia juga terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

Bencana merupakan musibah yang menimpa masyarakat, karena itu sebenarnya bencana menjadi tanggung jawab kita semua. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanggulangan karena itu upaya pencegahan akan memberikan dampak positif berupa menekan seminim mungkin korban jiwa dan harta benda dari kejadian bencana (Subiyantoro dan Iwan.2010:63-66).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertambahnya pengalaman manusia dalam menghadapi bencana alam, maka upaya penanggulangan bencana atau *disaster management* yang mengarah pada pengurangan resiko bencana menjadi semakin penting untuk diperhatikan.

Dalam menghadapi bencana yang sering terjadi di negara kita, maka Pemerintah beserta masyarakat telah berusaha meningkatkan perhatian dan kemampuan terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian internal dari pembangunan nasional, yaitu penanggulangan bencana sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah, bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan *emergency response* (Depkominfo, 2007:12).

Pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (*hazard*), memiliki kerentanan atau kerawanan (*vulnerability*), bencana alam tidak memberi dampak yang luas jika masyarakat setempat memiliki ketahanan bencana (*disaster resilience*). Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis serta memerlukan bantuan luar dalam penanganannya (Giri Wiarto. 2017:15-16).

Srtiap individu akan semakin sadar bahwa perlu untuk memiliki suatu system penanggulangan bencana yang komperhensif secara nasional atau *disaster management system*. Penanggulangan bencana yang efektif dilakukan sejak prabencana, pada saat tanggap darurat dan pascabencana serta diperlukan teknologi yang tepat. Salah satu teknologi yang diperlukan saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, (Maarif & Syamsul. 2010 : 1-7).

Salah satu solusi dari teknologi informasi adalah dengan perlunya penerapan sistem manajemen pengetahuan kebencanaan (disaster knowledge management

sistem) yang di dalam sistemnya menunjang dalam efektivitas dan efesiensi untuk proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan kebencanaan.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah, penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga non departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah, baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.

Kabupaten Timor Tengah Utara adalah salah satu kabupaten yang rawan bencana. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki suatu kondisi geologis, geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Bencana yang sering terjadi di Timor Tengah Utara dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Data bencana alam di Kabupaten TTU

No	Tahun	Jenis bencana	Daerah/wilayah terdampak
1	2020	Bencana banjir, bencana kebakaran, bencana angin, bencana longsor, dan bencana kekeringan	Kecamatan Kota Kefamenanu, Miomaffo Timur, Biboki Anleu, Bikomi Utara, Biboki Monleu, Biboki Utara, Naibenu, Insana, Bikomi Selatan, Musi, dan Miomaffo Barat
2	2021	Bencana banjir, bencana kebakaran, bencana angin,	Kecamatan Kota Kefamenanu, Insana Tengah, Insana Utara, Miomaffo Timur,
		dan bencana longsor	Naibenu, Bikomi Selatan, Insana Barat, Biboki Tanpah, Noemuti, Biboki Moenleu, Miomaffo Tengah, Biboki Anleu, Biboki Feotleu Dan Musi
3	2022	Bencana banjir, kebakaran, longsor, angin, dan kekeringan	Kecamatan Biboki Tanpah, Biboki Moenleu, Biboki Anleu, Kota Kefamenanu, Bikomi, Insana Utara, Insana Barat, Insana Fafinesu, Miomaffo Tengah, Noemuti, Musi, Dan Mutis

Sumber data: BPBD Kab.TTU Tahun 2022

Banyak kerugian yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi dimulai dari kerugian materi serta menimbulkan korban jiwa, maka penanganan masalah tersebut harus dilakukan dengan serius. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-

langkah manajemen penanggulangan bencana dimulai dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat/bencana, dan pasca bencana dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk di pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk di daerah, serta pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di dalamnya untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi.

Upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu: Kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi. Upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, pakaian, beras, air bersih, seng, peralatan dapur, dan peralatan mandi.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani bencana di daerah yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat meliputi pencegahan, penanganan kedaruratan,rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan/kesiapsiagaan pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penanggulangan bencana masih terbatas pada pelayanan korban akibat bencana, karena terbatasnya personil dalam penanggulangan bencana. Tabel berikut

menggambarkan data-data kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

> Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Urutan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural:	
1. Kepala pelaksana badan	1
2. Sekretaris	1
3. Kepala bidang	3
4. Kepala sub bidang	6
5. Kasubag	3
Jabatan fungsional	
Pelaksana	
Profesional/ahli	
TOTAL	32

Sumber data: BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Magister (S2)	1
Sarjana (S1)	12
Sarjana Muda (DIII)	3
SLTA/Sederajat	9
SLTP	3
SD	4

TOTAL	32

Sumber data: BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022

BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berkoordinasi dengan warga sekitar dan pihak-pihak terkait di daerah yang terjadi bencana untuk membantu dalam penanggulangan bencana. Pelayanan yang diberikan lebih terkonsentrasi pada pelayanan yang bersifat *emergency respon* (darurat) yaitu penyelamatan dan pemulihan (recovery). Sedangkan pelayanan yang bersifat pengembangan seperti melakukan sosialisasi bagi masyarakat yakni untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat masih relatif kurang dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sementara itu daerah yang berada pada rawan bencana bisa saja terjadi setiap saat.

Tabel 1.4 Bencana Alam Yang Terjadi Tahun 2015-2017 di TTU

No	Jenis Bencana	Jumlah KK Terdampak
1.	Bencana Banjir	24 KK
2.	Bencana Kebakaran	30 KK
3.	Bencana Longsor	6 KK
4.	Bencana Angin	15 KK

Berdasarkan bencana yang terjadi tahun-tahun sebelumnya maka pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam membangun kesiapsiagaan (keberdayaan masyarakat) harus melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat dan bagaimana karateristik bencana yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Penanganan Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara.?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Penanganan Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep dan teori Administrasi Publik tentang sumber daya dan pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Bencana dan memberi pengetahuan kepada semua pihak mengenai pentingnya kesiapsiagaan bagi masyarakat yang terdampak bencana sehingga dapat meminimalisir korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi
 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya bagi Dinas Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana.
- b. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan fokus yang sama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan bencana.